BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PROPOSISI

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini berisi teori dari beberapa ahli tentang definisi Pemberdayaan, definisi Pemberdayaan Masyarakat, definisi Proses Peberdayaan, definisi Prinsip Pemberdyaan, definisi Kemiskinan Extreme, dan definisi Stunting, kecamatan pakuhaji kabupaten tangerang sebagai berikut :

2.1.1 Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan suatu proses atau upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan, kemandirian, dan kontrol atas kehidupan individu atau kelompok tertentu. Proses ini melibatkan serangkaian tindakan dan strategi yang dirancang untuk menguatkan kapasitas dan potensi individu atau kelompok agar mereka dapat mengelola dan menentukan arah hidup mereka sendiri dengan lebih baik.

Tujuan utama dari pemberdayaan adalah untuk memberikan akses yang memadai kepada individu atau kelompok terhadap berbagai sumber daya yang diperlukan, termasuk pengetahuan, keterampilan, dan kesempatan. Dengan kata lain, pemberdayaan berfokus pada upaya untuk mengurangi ketergantungan dan meningkatkan kemampuan individu atau kelompok untuk berfungsi secara mandiri dan baik dalam berbagai aspek kehidupan mereka.

Melalui proses pemberdayaan yang baik, diharapkan individu atau kelompok tidak hanya dapat meningkatkan kualitas hidup mereka, tetapi juga dapat berperan

secara aktif dalam masyarakat, membuat keputusan yang berdampak positif, dan mengatasi berbagai tantangan yang mereka hadapi. Pemberdayaan, dengan demikian, memainkan peran krusial dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, mandiri, dan berdaya.

Pemberdayaan bukanlah proses yang sederhana atau mudah, karena sering kali melibatkan perubahan yang mendalam dalam dinamika kekuasaan, budaya, dan struktur sosial. Proses ini memerlukan penyesuaian terhadap berbagai tantangan dan hambatan yang ada, yang mungkin mencakup pergeseran dalam hierarki sosial, pembongkaran norma-norma budaya yang telah mapan, serta reformasi dalam struktur sosial dan institusi yang ada.

Perubahan dalam dinamika kekuasaan dapat berarti memindahkan kekuasaan dari pihak-pihak yang dominan ke individu atau kelompok yang sebelumnya terpinggirkan atau kurang berdaya. Hal ini sering kali melibatkan tantangan terhadap status quo dan perlawanan dari kelompok yang mungkin merasa terancam oleh perubahan tersebut. Oleh karena itu, pemberdayaan memerlukan strategi yang sensitif dan inklusif, serta keterlibatan berbagai pihak untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan dapat diterima dan berdampak positif.

Selain itu, pemberdayaan juga melibatkan transformasi budaya yang sering kali membutuhkan waktu dan upaya yang signifikan. Budaya masyarakat sering kali mencakup pola pikir, nilai-nilai, dan praktik yang dapat membatasi atau mendukung proses pemberdayaan. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi dan mengubah sikap serta pandangan masyarakat terhadap isu-isu seperti kemiskinan,

ketidaksetaraan, dan hak-hak individu agar pemberdayaan dapat diterima dan berhasil.

Pemberdayaan Menurut Gunawan Sumodiningrat dalam buku Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengamanan Sosial pada tahun 1999 halaman 133-134 berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui 3 (tiga) jalur, yaitu:

> "1. Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*Enabling*).
> 2. Menguatkan potensi dan daya yang dimiliki masyarakat (*Empowering*).
> 3. Memberikan perlindungan (*Protecting*) (Sumodiningrat, 1999:134-135)."

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sehingga mereka dapat mencapai kemandirian dan membebaskan diri dari belenggu kemiskinan serta keterbelakangan. Dalam konteks pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat memiliki peran penting dalam membangun kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam skala komunitas, kebangsaan, maupun kenegaraan.

Proses pemberdayaan ini melibatkan berbagai langkah untuk memperkuat kapabilitas masyarakat melalui peningkatan akses terhadap sumber daya, pengetahuan, keterampilan, dan kesempatan. Hal ini mencakup upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, memperkuat struktur organisasi lokal, serta membangun jaringan sosial yang mendukung kolaborasi dan solidaritas.

Dalam Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, (2017 ; 161)

> "Istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok, dan masyarkat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungan agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksebilitasnya terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaanya, aktivitas sosial dan lainnya." (Mardikanto&Soebianto, 2017;161)

Menurut (Papilaya) pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.

Menurut Sulistyani, pemberdayaan yaitu secara etimologis berasal dari kata "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya, kekuatan, dan proses pemberian daya dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang belum berdaya atau kurang berdaya.

Dapat dijelaskan bahwa sebuah daya berarti sebuah kekuatan, berdaya berarti memiliki kekuatan. Namun pada perkembangannya dari berbagai referensi dan bidang menunjukan bahwa keragaman pengertian atas makna pemberdayaan tersebut yang artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mampunyai kekuatan.

Pemberdayaan menurut (Suharto, 2014) secara koseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (*Empowermnet*) berasal dari kata "*Power*" (keuasaan dan keberdayaan). Karena ide utama pemberdayaan yang bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan ini seringkali dikaitkan dengan kemampuan seseorang untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas

dari keiiginan dan minat mereka. Pemberdayaan diadaptasi dari istilah Empowerment berkembang di Eropa mulai abad pertengahan, lalu berkembang hingga akhir tahun 1970, sampai awal tahun 1990-an. Konsep pemberdayaan tersebut kemudian mempengaruhi teori-teori yang berkembang. Berkenaan dengan itu pemaknaan konsep pemberdayaan Masyarakat, Suharto dalam bukunya yang berjudul Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat.

Dimana Suharto mendefinisikan pemberdayaan yaitu :

> "Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai sebuah proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjukan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan social, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun social seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan social, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya." (Suharto, 2014: 59)

Menurut kutipan tersebut, pemberdayaan bertujuan untuk memberikan kekuatan atau wewenang kepada individu atau kelompok yang kurang berdaya. Dengan memberikan kekuatan atau wewenang ini, diharapkan mereka dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka sendiri.

Menurut Wasistiono dalam bukunya mengutip pertanyaan dari Carlzon dan Macauley yang menjelaskan bahwa pemberdayaan diartikan sebagai "membebaskan seseorang dari kendali yang kaku, dan memberi orang kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, Keputusan-keputusannya dan Tindakan-tindakannya." (Wasistiono, 1999:6)

Sedangkan Menurut Sulistiyani adalah untuk membentuk individu dan maysrakat menjadi mandiri.

> “Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Untuk mencapai kemandirian Masyarakat tersebut membutuhkan suatu proses. Seperti melalui proses belajar maka Masyarakat akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu.” (Sulistiyani, 2004:80).

Pemberdayaan adalah konsep yang berkaitan erat dengan kontrol dan pengaruh. Istilah "kontrol" sering kali diasosiasikan dengan kapasitas seseorang untuk memengaruhi tindakan dirinya sendiri atau orang lain sesuai dengan keinginannya. Kemampuan ini dapat diterapkan baik pada tingkat individu maupun dalam konteks kelompok.

Dalam hal ini, kontrol mencakup kemampuan untuk menentukan arah tindakan dan keputusan yang diambil, baik dalam konteks personal maupun kolektif. Pemberdayaan berfokus pada meningkatkan kapasitas individu atau kelompok untuk memiliki kontrol yang lebih besar atas situasi mereka, memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka dan lingkungan mereka secara lebih baik.

Konsep ini melibatkan pemberian sumber daya, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk memperkuat kapasitas pengambilan keputusan dan tindakan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi individu atau kelompok. Dengan demikian, pemberdayaan tidak hanya memfasilitasi kontrol pribadi tetapi juga meningkatkan kemampuan kolektif untuk berpartisipasi dan memengaruhi proses sosial, ekonomi, dan politik.

Pemberdayaan adalah suatu konsep yang berkaitan dengan pemberian kekuatan atau wewenang kepada berbagai pihak, sekaligus mengurangi kekuasaan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berkuasa. Pemberdayaan bertujuan untuk menyeimbangkan kekuasaan dengan cara meningkatkan kapasitas dan kontrol individu atau kelompok yang sebelumnya kurang berdaya.

Menurut Oos M. Anwas dalam bukunya "Pemberdayaan Masyarakat di Era Global," pemberdayaan didefinisikan sebagai berikut:

> "Pemberdayaan (*empowerment*) tersebut menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, atau pengalihan kekuasaan kepada individua tau masayarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungan sesuai dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimilikinya." (Anwas, 2019:51)

Pemberdayaan tidak hanya berlaku pada tingkat individu, tetapi juga pada tingkat kolektif. Proses pemberdayaan harus mencakup upaya untuk mencapai potensi penuh baik secara individu maupun dalam konteks kelompok, serta mewujudkan eksistensi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan secara bersama-sama. Dengan kata lain, manusia dan nilai-nilai kemanusiaan harus dijadikan sebagai standar normatif, struktural, dan substansial dalam proses pemberdayaan. Hal ini berarti bahwa pemberdayaan harus mempertimbangkan dan mengintegrasikan aspek-aspek kemanusiaan yang fundamental, sehingga dapat mendorong pencapaian kualitas hidup yang lebih baik dan lebih adil untuk seluruh masyarakat. *"many client's oppression by and alienation from powerful groups in society is better recognized, as in the close relationship of social workers and their agencies with those groups".* (Payne dalam Hikmat, 2010:46).

Dari penjelasan sebelumnya, inti dari pendekatan pemberdayaan menegaskan pentingnya kekuatan serta kebutuhan akan dukungan bagi pihak-pihak yang tidak memiliki kekuatan. Pendekatan ini menyoroti bahwa setiap individu memiliki potensi kekuatan yang dapat menjadi dasar bagi proses pemberdayaan. Manusia diharapkan mampu memanfaatkan peluang dan mencari kesempatan untuk mewujudkan eksistensinya secara optimal. Namun, perlu diakui bahwa pencapaian diri adalah kebutuhan dasar yang esensial dan tidak dapat diabaikan bagi setiap individu.

Ada lima pendekatan dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk dapat memberdayakan dengan pendekatan-pendekatan berikut:

1. Pendekatan dari bawah (buttom up approach) pada kondisi ini pengelolaan dan para stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
2. Partisipasi (*participation*) dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
3. Konsep keberlanjutan merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.
4. Keterpaduan yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, Regional dan nasional.
5. Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan.
   (Drijver dalam Sutrisno, 2005:18)

Menurut penjelasan sebelumnya, disarankan bahwa pemberdayaan masyarakat sebaiknya menggunakan pendekatan yang berasal dari basis masyarakat agar dapat mencakup semua golongan masyarakat dengan partisipasi yang luas dari mereka, termasuk pihak terkait seperti lembaga pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk menerapkan ide pengembangan kemandirian masyarakat secara berkelanjutan dengan strategi sosial ekonomi yang kokoh.

2.1.2 Proses Pemberdayaan

Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan dalam proses pemberdayaan masyarakt:

1. Pertama, kecenderungan primer yaitu proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagain kekuatan, kekuasaan, kemampuan dan pengambilan keputusan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya.
2. Kedua, kecenderungan sekunder yaitu proses yang menekankan pada upaya menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Dua kecenderungan tersebut dapat dilakukan Bersama-sama, tetapi yang sering terjadi kecenderungan primer berjalan berlebih dulu untuk mendukung kecenderungan sekunder.

Dalam proses pemberdayaan dibutuhkan tahapan pemberdayaan sebagai berikut :

1) Penyadaran

Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perubahan, serta menumbuh kembangkan keyakinan masyarakat terhadap keberhasilan upaya-upaya perubahan yang akan dilakukan melalui pembangunan berbasis masyarakat, seringkali diterapkan metode pelatihan untuk menumbuhkan kembangkan motivasi atau *Achievement Monitoring Training* (ATM), yaitu

latihan motivasi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa.

2) Pelatihan

Pelatihan merupakan suatu proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, menurut Moekijat pelatihan adalah suatu bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan diluar sistem Pendidikan yang berlaku, dalam waktu relative singkat dan metode yang lebih mengutamakan praktek daripada teori.

3) Pendampingan

Pada dasarnya pendampingan merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik.

4) Evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan.

2.1.3 Prinsip Pemberdayaan

Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu:

1. prinsip kesetaraan prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejahteraan

kedudukan anatara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat.

2. Partisipasi program pemberdayaan yang dapat menstimulus kemandirian masyarakat adalah program yang bersifat partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan di evaluasi oleh masyarakat.
3. Kedewasaan atau kemandirian prinsip kedewasaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat dari pada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (the have not), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (the have litle). Mereka mempunyai kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi.
4. Berkelanjutan program pemberdayaan perlu direncanakan untuk berkelanjutan sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan disbanding masayarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatan sendiri.

Pemberdayaan tidak hanya sekadar memberikan kekuasaan atau wewenang kepada pihak-pihak yang kurang berdaya. Lebih dari itu, pemberdayaan melibatkan sebuah proses pendidikan yang mendalam dan sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Proses ini mencakup berbagai upaya untuk memperkuat kapasitas dan

keterampilan, serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang diperlukan agar mereka dapat menjadi lebih berdaya. Dengan demikian, mereka tidak hanya mampu bersaing secara baik dalam berbagai aspek kehidupan tetapi juga dapat hidup secara mandiri dan mandiri secara ekonomis. Pemberdayaan yang baik akan menciptakan individu dan komunitas yang lebih kuat dan resilien, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

> ”Pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempe-ngaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri.” (Ife, 1995)

Untuk memahami konsep pemberdayaan dengan lebih mendalam, penting untuk merujuk pada pandangan yang dikemukakan oleh Ife (1995). Pemberdayaan tidak hanya melibatkan aspek-aspek seperti pemberian kekuasaan, tetapi juga mencakup proses yang lebih luas dan terstruktur. Konsep ini menekankan perlunya penyediaan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada masyarakat. Dengan demikian, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelompok dalam menentukan masa depan mereka serta memungkinkan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dan mempengaruhi dinamika kehidupan dalam komunitas mereka. Memahami definisi ini membantu kita menyadari betapa pentingnya pendekatan yang komprehensif dalam pemberdayaan untuk menciptakan perubahan yang berarti dan berkelanjutan dalam masyarakat.

2.1.4 Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Friedman dalam Munawar Noor, proses pemberdayaan masyarakat ada 3 aspek upaya dalam memberdayakan masyarakat (*empowering*) yang dipergunakan yaitu :

1. *Enabling*, yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang.
2. *Empowering*, yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya,
3. *Protecting*, yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. (Friedman)

Menurut Chambers (Zubaedi), mengungkapkan

> "Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkul nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigm baru pembangunan yang bersifat people- centered, participatory. Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi sekarang telah banyak diterima, bahkan telah berkembang dalam berbagai literature di dunia barat. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunanekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial." (Chambers)

Lalu pemberdayaan menurut masyarakat menurut Adibowo R (2015) dalam Jurnal Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

> "Memberikan kekuatan kepada masyarakat menunjukkan pentingnya memiliki mental yang kuat. Proses pemberdayaan masyarakat memiliki dua arah: Pertama, ada fokus pada memberikan atau mentransfer sebagian kekuasaan, kekuatan, atau keterampilan kepada masyarakat atau individu agar lebih mampu bertahan (prinsip *survival of the fittest*)". Adibowo R (2015)

Menurut Mubyarto, pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Keberadaan masyarakat merupakan unsure dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri untuk mencapai suatu kemajuan. Memberdayakan masyarakat berarti meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan, dengan kata lain memberdayakan adalah memandirikan masyarakat.

Dalam bukunya Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto yang berjudul Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan fublik menyatakan juga bahwa :

> ”Pemberdayaan sebagai suatu proses yang bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumberdaya setempat sebaik mungkin.” (Mardikanto&Soebianto, 2017;125).

Secara lebih rinci Slamet (2003), menekankan bahwa “Hakikat pemberdayaan adalah bagaiaman membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri.” (Slamet, 2003)

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sumber daya manusia/masyarakat itu sendiri dalam bentuk penggalian kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik dari waktu sebelumnya. Pemberdayaan masyarakat sangat penting dan merupakan hal wajib untuk dilakukan mengingat pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang demikian pesatnya belakangan ini akan sangat mempengaruhi kemampuan tiap individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu masyarakat luas diharapkan

mampu mengikuti perkembangan zaman dengan adaya pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk :

1. Melahirkan individu-individu yang mandiri dalam masyarakat
2. Menciptakan lingkungan yang memiliki etos kerja yang baik sehingga mampu menciptakan kondisi kerja yang sehat dan saling menguntungkan
3. Menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi akan potensi diri dan lingkungan disekitarnya dengan baik
4. Melatih dan memampukan masyarakat untuk melakukan perencanaan dan pertanggungjawaban atas Tindakan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya
5. Menambah kemampuan berpikir dan bernegosiasi atau mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin ditemui dalam lingkungannya
6. Memperkecil angka kemiskinan dengan cara meningkatkan potensi dan kemampuan dasar yang dimiliki oleh masyarakat.

Masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang hidup dalam suatu masyarakat madani (moving), yakni suatu masyarakat yang percaya atas kemampuan para anggotanya untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik serta masyarakat yang menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam hidup bermasyarakat dimana kondisi pemberdayaan akan terwujud apabila anggota masyarakat memperoleh kesempatan agar semakin berdaya.

2.1.5 Masyarakat

Masyarakat adalah Masyarakat adalah kelompok individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu, berbagi norma, nilai, budaya, dan interaksi sosial. Mereka saling berhubungan dan membentuk jaringan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aspek ekonomi, politik, dan kesehatan. Masyarakat juga berfungsi sebagai sistem dukungan, di mana individu dapat berkolaborasi dan saling membantu untuk mencapai tujuan bersama.

> ”Salah satu definisi dari masayrakat juga pada awalnya adalah *”a union of families”* atau masayrakat merupakan gabugan atau kumpulan dari keluarga-keluarga. Awal dari masayarakat juga dapat kita katakan berasalah dari hubungan anatara individu, kemudian kelompok yang lebih membesar lagi menjadi suatu kelompok masyarakat.” (Khairuddin, 2008:63)

Masyarakat sebagai entitas sosial memiliki akar yang mendalam dalam hubungan antarkeluarga. Pemahaman ini, sebagaimana dinyatakan oleh Khairuddin, menunjukkan bahwa struktur masyarakat terbentuk dari interaksi dasar antara individu yang membentuk ikatan keluarga. Dengan berjalannya waktu, hubungan ini berkembang menjadi kelompok yang lebih besar, membentuk fondasi bagi komunitas yang kompleks.

Tulisan ini menggarisbawahi bahwa masyarakat tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berkembang dari relasi antarkeluarga. Definisi *"a union of families"* menekankan pentingnya peran keluarga sebagai blok dasar dalam pembentukan masyarakat. Proses ini menunjukkan bahwa interaksi antarindividu dan kelompok kecil dapat mengarah pada pembentukan jaringan sosial yang lebih luas, menciptakan norma dan nilai bersama. Dengan demikian, pemahaman ini mengajak

kita untuk menyadari bahwa setiap individu dan keluarga memiliki kontribusi penting dalam menciptakan struktur sosial yang harmonis.

> ”Masyarakat adalah suatu kesatuan yang selalu berubah yang hidup kerena proses masayrakat. Masyarakat terbentuk memlaui hasil interaksi yang kontinyu anatar individu. Dalam kehidupan bermasayarakat selalu dijumpai saling pengaruh mempengaruhi antar kehidupan individu dengan kehidupan bermasayarakat.” (Soetomo, 2009:355)

Masyarakat sebagai suatu kesatuan yang dinamis mencerminkan proses sosial yang selalu berubah. Menurut Soetomo, masyarakat tidak statis, melainkan terbentuk dan berkembang melalui interaksi terus-menerus antarindividu. Proses ini menciptakan jaringan sosial yang saling memengaruhi, membentuk kehidupan bersama yang kompleks.

Tulisan itu juga menekankan bahwa masyarakat adalah hasil dari interaksi sosial yang berkelanjutan, di mana individu saling memengaruhi satu sama lain. Konsep perubahan yang terus-menerus dalam masyarakat menunjukkan bahwa hubungan antarindividu tidak hanya berdampak pada diri mereka sendiri, tetapi juga pada struktur sosial secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman tentang masyarakat harus mempertimbangkan dinamika dan interaksi yang berlangsung, serta bagaimana setiap individu berkontribusi dalam membentuk nilai dan norma bersama.

Masyarakat adalah golongan masyarakat kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh- mempengaruhi satu sama lain. (Hasan Shadily 1984:47).

Menurut Mayor Polak dalam Abu Ahmadi (2003:96), menyebutkan bahwa masyarakat adalah wadah segenap antar hubungan sosial terdiri atas banyak sekali kolektiva-kolektiva serta kelompok dalam tiap-tiap kelompok terdiri atas kelompok-kelompok lebih baik atau sub kelompok.

Sedangkan menurut Djojodiguno tentang masyarakat adalah suatu kebulatan dari pada segala perkembangan dalam hidup bersama antar manusia dengan manusia (Djojodiguno dalam Abu Ahmadi 2003:97).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa masayarakat adalah sekelompok manusia majemuk yang tinggal dalam suaru teritorial tertentu dan terdiri dari beraneka ragam kelompok yang memiliki kesepakatan bersama berupa aturan-aturan ataupun adat istiadat yang timbul dan tercipta karena kebersamaan itu sendiri dan juga kesepakatan bersama yang timbul setelah kehidupan itu berlangsung dalam waktu yang cukup lama.

Dalam konteks masyarakat yang dinamis, program Gebrak Tegas di Kabupaten Tangerang menjadi contoh konkret bagaimana interaksi sosial dapat difasilitasi untuk mencapai tujuan bersama. Program ini berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pendekatan kolaboratif, di mana berbagai elemen, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, bekerja sama untuk mengatasi tantangan sosial dan ekonomi.

Gebrak Tegas mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam merumuskan dan menerapkan solusi yang relevan dengan kebutuhan lokal. Dengan melibatkan berbagai kelompok dalam proses pengambilan keputusan, program ini tidak hanya

memperkuat kesepakatan bersama tetapi juga membangun rasa memiliki di antara anggotanya. Aturan dan norma yang ditetapkan dalam program ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan saling mendukung, sejalan dengan prinsip-prinsip masyarakat yang majemuk.

Melalui program ini, masyarakat Kabupaten Tangerang diharapkan dapat mengembangkan solidaritas dan kebersamaan yang lebih kuat, sehingga mampu menghadapi tantangan bersama dengan lebih efektif. Dengan demikian, Gebrak Tegas tidak hanya berfungsi sebagai inisiatif pembangunan, tetapi juga sebagai wahana untuk memperkuat identitas dan kesepakatan bersama dalam menghadapi perubahan zaman.

2.1.6 Stunting

Stuting atau pendek adalah sebuah kondisi dimana tinggi badan seseorang ternyata lebih pendek disbanding tinggi badan orang lain pada umumnya (yang sesuai). Stunting atau pendek juga di artikan sebagai kondisi gagal tumbuh pada bayi (0-11 bulan) dan anak balita (12-59 bulan) akibat dari kekurangan gizi kronis terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan sehingga anak pendek seusianya. Kekurangan gizi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir, tetapi kondisi stunting baru Nampak setelah anak berusia 2 tahun.

Balita dikatakan pendek jika nilai z-score-nya panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menuru umur (TB/U) kurang dari -2SD/standar deviasi (stunted) dan kurang dari -3SD(severely stunted). Balita stunted akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadi lebih rentan tehadap penyakit, dan

dimasa depan dapat beresiko menurunnya tingkat produktivitas52. Pada akhirnya, secara luas, stunted akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemiskinan.

2.1.6.1 Penyebab Stunting

Penyebab stunting yaitu faktor multidimensi, diantara peraktik pengasuhan gizi yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehattan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan serta setelah ibu melahirkan.

Intervensi yang paling menentukan menentukan untuk dapat mengurangi pervalensi stunting perlu dilakukan pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) dari anak balita. Peluang intervensi yang terbukti bagus di antaranya adalah intervensi yang terkait praktik-praktik pemberian makanan anak dan pemenuhan gizi ibu. Berdasarkan fakta dan informasi yang ada menunjukkan bahwa hanya 22,8% dari anak usia 0-6 bulan yang menyusu eksklusif dan hanya 36,6% anak usia 7-23 bulan yang menerima makanan pendamping ASI (MPASI) yang sesuai dengan praktik-praktik yang direkomendasikan dengan pengaturan waktu, frekuensi, dan kualitas.

MPASI diberikan atau mulai diperkenalkan ketikaa balita berusia di atas 6 bulan. Selain berfungsi untuk mengenalkan jenis makanan baru pada bayi, MPASI juga dapat mencukupi kebutuhan gizi bayi yang tidak lagi dapat disokong oleh Asi serta membentuk daya tahan tubuh dan perkembangan system imunologis anak terhadap makanan dan minuman.

Dalam hal ini, masyarakat dan petugas kesehatan perlu memahami pentingnya ASI eksklusif dan praktik-praktik pemberian makan bayi dan anak yang tepat serta memberikan dukungan kepada para ibu.

1) Terbatasnya layanan Kesehatan termasuk layanan anc (*ante natal care)*, post natal dan pembelajran dini yang berkualitas
2) 1 dari 3 anak usia 3-6 tahun tidak terdaftar di Pendidikan anak usia dini
3) 2 dari 3 ibu hamil belum mengkonsumsi suplemen zat besi yang memadai
4) Menurunnya tingkat kehadiran anak di posyandu (Dari 79% di 2007 menjadi 64% di 2013)
5) Tidak mendapat akses yang memadai ke layanan imunisasi
6) Kurangnya akses ke makanan bergizi
7) 1 dari 3 ibu hamil anemia
8) Makanan bergizi mahal
9) Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi
10) 1 dari 5 rumah tangga masih BAB diruang terbuka 1 dari 3 rumah tangga belum memiliki akses ke air minum bersih.

2.1.6.2 Ciri-Ciri stunting pada anak

Dapat diihat dari:

a. Tanda purbetas terhambat
b. Anak usia (8-10) menjadi lebih pendiam
c. Pertumbuhan terlambat
d. Wajah lebih muda dari usianya

e. Tanda pubertas terlambat

f. Performa buruk pada tas perhatian dan memori belajar

g. Pertumbuhan gigi terlambat

2.1.7 Kemiskinan *Extreme*

Schiller dalam Suyanto megungkapkan bahwa "kemiskinan adalah ketidaksanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial".

Laju urbanisasi sangat berhubungan dengan munculnya kawasan padat, kumuh dan miskin, seperti yang diungkapkan oleh Schoorl menyatakan bahwa urbanisasi itu berjalan dengan cepat, sehingga menimbulkan kekurangan fasilitas, ketidakmampuan pemerintah itu harus ditambah dengan ketidakmampuan penduduk untuk mengadakan fasilitas pokok, akibatnya lahirlah perkampungan slum.

Pemukiman dan tempat tinggal juga bisa menjadi salah satu penyebab kemiskinan menurut Kuswartojo mendefinisikan nya sebagai berikut.

> "Permukiman merupakan perumahan dengan segala isi dan kegiatan yang ada didalamnya. Yang artinya permukiman memiliki arti bukan hanya sekedar perumahan dengan wadah fisik saja, akan tetapi perpaduan diantara wadah (alam, lindungan, dan jaringan) serta isinya (termasuk yang bermasyarakat beserta budaya didalamnya)." (Kuswartojo).

Dimensi kemiskinan juga bersifat kompleks, oleh karena itu para ahli mengkasifikasikan dalam tiga jenis kemiskinan (Harniati, 2010) yaitu :

1. Kemiskinan alamiah, merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang rendah. Kondisi alam dan sumber daya yang rendah membuat peluang produksi juga rendah. Khusus

untuk sektor pertanian, kemiskinan yang terjadi lebih diakibatkan kualitas lahan dan iklim yang tidak mendukung aktivitas pertanian. Dari seluruh wilayah di Indonesia, lahan subur justru banyak dijumpai di pulau Jawa. Sedangkan di luar Jawa, sumber daya alam yang subur jumlahnya terbatas, hal ini membuat petani hanya dapat menanami lahan sewaktu ada hujan, keadaan ini menebakan hasil produksi hanya dapat diperoleh dalam satu tahun.

2. Kemiskinan kultural, kemiskinan yang terkait erat dengan sikap seeorang atau kelompok dalam masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya, sekalipun ada usaha untuk memperbaiki dari pihak lain yang membantunya. Kemiskinan ini dapat pula disebabkan karena sebagian sistem dalam tradisi masyarakat berkontribusi dalam menyebabkan terjadinya kemiskinan masyarakat. Sebagai contoh adalah sistem waris yang mengakibatkan pembagian lahan, sehingga kepemilikan lahan per keluarga semakin lama menjadi semakin sempit.
3. Kemiskinan struktural, kemiskinan yang secara langsung maupun tidak disebabkan oleh tatanan kelembagaan atau struktur sosial dalam masyarakat. Tatanan kelembagaan atau struktur sosial disini dapat diartikan sebagai tatanan organisasi maupun aturan permainan yang diterapkan. Kebijakan-kebjakan yang ditetapkan oleh pemerintan seringkali menyebabkan sebagian kelompok dalam masyarakat mengalami kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi disebabkan oleh keterbatasan bahkan tidak dimilikinya akses kelompok miskin kepada sumber daya-sumber daya pembugunan yan ada. Kemiskinan yang disebabkan oleh struktur sosial yang berlaku ini telah menyebabkan terkurungnya kelompok masyarakat tertentu dalam suasana kemiskinan, yang bahkan telah berlangsung secara turun temurun. Kemiskinan struktural hanya dapat diatasi jika terjadi proses perubahan struktural hanya dapat diatasi jika terjadi suatu proses perubahan struktur dalam masyarakat secara mendasar. (Harniati,2010)

Ketiga dimensi itu menggambarkan bahwa penyebab kemiskinan tidaklah tunggal, bisa berasal dari kondisi alam yang tidak memberikan keuntungan secara ekonomi, seperti yang diperlihatkan kemiskinan alamiah. Namun bisa juga kemiskinan itu disebabkan oleh faktor manusianya, seperti yang digambarkan pada kemiskinan kurtural. Kemiskinan juga dapat disebabkan oleh kondisi yang diciptakan oleh manusia melalui struktur dan institusi dalam masyarakat, seperti yang terlihat dalam dimensi kemiskinan struktural. Petani di daerah pedesaan mengalami kemiskinan bukan hanya karena kualitas sumber daya manusia yang

rendah, tetapi juga karena struktur dan kebijakan di sektor pertanian yang tidak mendukung pengembangan sektor tersebut. Umumnya, kemiskinan struktural di kawasan pedesaan dirasakan oleh petani yang tidak memiliki lahan atau buruh tani, serta buruh penggarap, sehingga hasil pertanian mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka dan keluarga mereka.

Lalu menurut Cox penyebab kemiskinan itu berrsifat kompleks dan terbagi dalam beberapa dimensi penyebab kemiskinan yaitu :

1. Kemiskinan yang diakibatkan oleh globalisasi. Globalisasi melahirkan negara pemenang dan negara kalah. Pemenang umumnya adalah Negara-negara maju, sedangkan negara-negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi. Karena negara-negara berkembang terpinggirkan maka jumlah kemiskinan di negara-negara berkembang jauh lebih besar dibandingkan negara-negara maju.
2. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Pola pembangunan yang diterapkan telah melahirkan beberapa bentuk kemiskinan, seperti kemiskinan perdesaan, adalah kondisi wilayah desa yang mengalami kemiskinan akibat proses pembangunan yang meminggirkan wilayah perdesaan; kemiskinan perkotaan, yaitu kondisi kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan ekonomi, dimana tidak semua kelompok memperoleh keuntungan.
3. Kemiskinan sosial, dimensi ketiga ini melihat pada kondisi sosial masyarakat yang tidak menguntungkan beberapa kelompok dalam masyarakat. Misalnya kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak dan kelompok minoritas merupakan kemiskinan yang diakibatkan kondisi sosial yang tidak menguntungkan kelompok tersebut. Kondisi sosial yang dimaksud misalnya bias gender, diskriminasi, atau eksploitasi ekonomi.
4. Kemiskinan konsekuensial. Dimensi keempat ini menekankan faktor-faktor eksternal yang menyebabkan kemiskinan. Faktor-faktor yang dimaksud adalah konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk. Faktor-faktor tersebut lah yang menyebabkan munculnya kemiskinan dalam masyarakat. (Cox 2004; 1-6)

Dimensi yang diperkenalkan oleh Cox jauh lebih luas dibandingkan dengan pandangan para ahli sebelumnya karena Cox memasukkan globalisasi sebagai salah satu dimensinya. Melalui dimensi ini, dapat dijelaskan bahwa tingkat kemiskinan

di suatu negara bisa dipengaruhi oleh pola perekonomian global. Selain itu, perekonomian dunia juga dapat memengaruhi pola pembangunan di suatu negara. Jika pola pembangunan yang diterapkan tidak merata di setiap wilayah, pembangunan tersebut bisa menjadi salah satu penyebab kemiskinan.

Perlunya suatu strategi untuk menanggulangi kemiskinan ini, menurut Soegijoko pada tahun 1997 mengatakan tentang penanggulangan kemiskinan sebagai berikut.

> ”Usaha penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan sejak lama walaupun intensitanya beragam sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Upaya mengurangi penduduk miskin melalui pembangunan dirancang untuk memecahkan tiga masalah utama yaitu pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan.” (Soegijoko, 1997:148).

Meski upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan sejak lama dengan intensitas yang bervariasi tergantung pada kondisi sosial ekonomi masing-masing masyarakat, tantangan yang dihadapi tetap signifikan. Penanggulangan kemiskinan tidak hanya sekadar tentang menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memerlukan pendekatan yang holistik untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan dan masalah mendasar lainnya. Dengan fokus pada tiga masalah utama pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan itu sendiri kita dapat merancang strategi pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu rangkaian konsep atau teori yang digunakan untuk memandu pemahaman, analisis, dan penelitian terhadap suatu masalah atau fenomena. Para ahli sering menggunakan kerangka pikir untuk

mengorganisir ide-ide mereka dan menyajikan suatu pendekatan sistematis terhadap topik yang mereka teliti.

Berikut ini adalah kerangka berfikir dan teori yang saya gunakan dalam penelitan ini sebagai berikut :

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya sosial di mana penduduk suatu komunitas mengatur diri mereka sendiri untuk merencanakan dan melakukan tindakan bersama guna mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial, dengan menggunakan kemampuan dan sumber daya yang tersedia. Tujuan dari pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kemandirian individu yang rentan atau kurang beruntung. Konsep pemberdayaan merujuk pada usaha untuk menggeser kembali kekuasaan melalui perubahan dalam struktur sosial.

Pemberdayaan merupakan suatu proses dan tujuan yang saling terkait. Sebagai suatu proses, Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Gebrak Tegas Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang menghadapi beberapa tantangan, di antaranya adalah kurangnya kemampuan aparat pemerintah dalam mengedukasi dan mensosialisasikan program Gebrak Tegas sehingga masyarakat kurang memahami program tersebut. Hal ini juga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, yang seharusnya mendorong pengembangan potensi masyarakat, mengubah pola pikir mengenai kemiskinan *extreme* dan *stunting*. Konsep pemberdayaan sebagai tujuan sering digunakan sebagai penanda keberhasilan pemberdayaan masyarakat sebagai proses.

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, maka peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Penciptaan Iklim yang memungkinkan potensi Masyarakat, meciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang dalam mengurangi angka Kemiskinan Extreme dan Stunting untuk meningkatkan dan memaksimalkan kemampuan, bakat atau sumber daya yang dimiliki masyarakat untuk program Gebrak Tegas. Adapun Langkah-langkah pengembangan potensi tersebut dilakukan degan Langkah-langkah sebagai berikut:
    a) Pengetahuan adalah hasil dari proses pengalaman masyarakat Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang dalam mengenali dan menyadari bahwa kemiskinan extreme dan stunting saat ini melalui program Gebrak Tegas.
    b) Memotivasi adalah dorongan semangat kepada masyarakat Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang untuk mencapai tujuan dalam mengurangi angka kemiskinan extreme dan stunting melalui program Gebrak Tegas.
2. Memperkuat Potensi Masyarakat adalah salah satu untuk memperkuat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki masyarakat Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang dalam Program Gerak Tegas. Faktor yang mempengaruhi kemampuan yaitu sebagai berikut :

a) Pendidikan adalah untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang dalam mengurangi kemiskinan *extreme* dan *stunting*.
b) Pelatihan adalah upaya memberikan kecerdasan masayarakat dalam menangani kemiskinan *extreme* dan *stunting* di Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang.
c) Pembinaan adalah upaya masyarakat Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang dalam mencegah kemiskinan *extreme* dan *stunting*.

3. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi dan terhindar dari terjadinya dari persaingan yang tidak seimbang pada masayarakat Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang. Perlindungan terdiri dari:
   a) Bertukar pikiran dalam suatu aktivitas yang di selengarakan oleh aparatur untuk melindungi dan memperbaiki kondisi individu dan keluarga yang terdampak oleh kemiskinan extreme dan stunting di Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang.
   b) Keterampilan dasar adalah kemampuan yang dimiliki masayrakat Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang dalam mencegah kemiskinan *extreme* dan *stunting*.
   c) Komunikasi adalah keterkaitan interaksi masyarakat Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang dalam mencegah kemiskinan *extreme* dan *stunting*.

Berikut ini adalah merupakan model kerangka pemikiran untuk memperjelas penjelasan teori pada kerangka pemikiran dan yang di uraikan diatas:

Gambar 2. 1
Model Kerangka Pemikiran

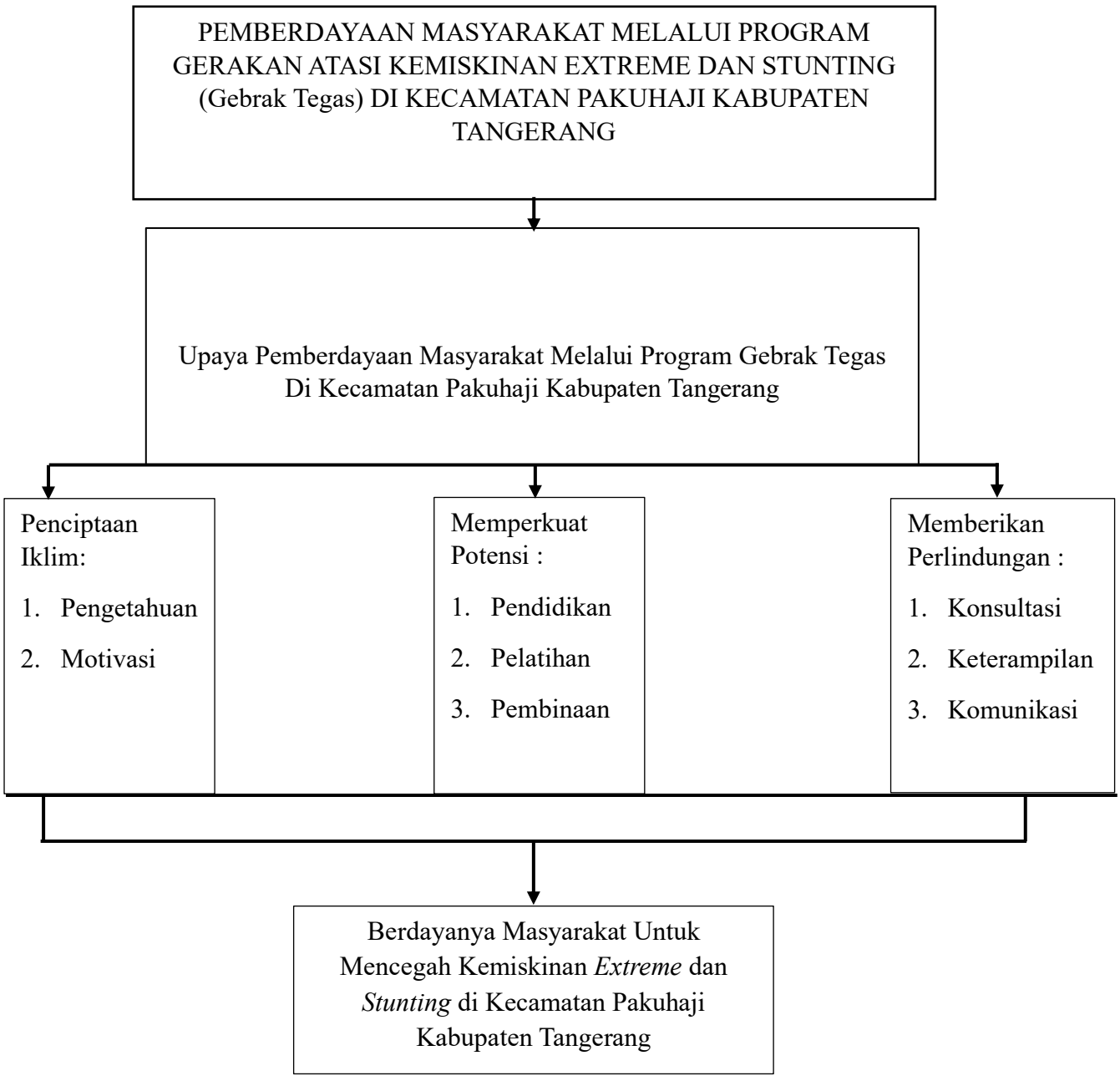

(Sumber : Olahan Peneliti 2024)

2.3 Proposisi

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka proposisi yang diajukan dalam penelitian ini adalah pengembangan potensi, memperkuat potensi, dan perlindungan. Dalam Pemberdayaan Masayrakat melalui Program Gebrak Tegas di Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang.